



# RAPBD Melawi 2019 Disahkan

▶ Enam Fraksi Setujui Belanja APBD Senilai Rp 1,171 Triliun

**NANGA PINOH, SP** – Rancangan APBD Melawi Tahun Anggaran 2019, akhirnya disepakati pada Rabu (5/12), tepatnya pada pukul 23.00 WIB. Paripurna persetujuan RAPBD Melawi sendiri digelar malam hari, untuk mengejar *deadline* waktu pengesahan yang ditetapkan oleh Pemprov Kalbar.

Sidang Paripurna DPRD yang mengagendakan Pendapat Akhir (PA) Fraksi tentang Persetujuan DPRD atas RAPBD 2019, serta Persetujuan sejumlah Raperda-Raperda Melawi 2018 molor dua jam dari jadwal yang direncanakan yakni pukul 19.00 WIB. Sidang baru dibuka pimpinan rapat yakni ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin pada sekitar pukul 21.00 WIB. Rapat dihadiri Bupati Panji dan Wakil Bupati Dadi Sunarya, Forkopimda serta sebagian kepala SKPD dan juga tokoh masyarakat.



**Kartika Sari Astuti**  
Fraksi PAN

**Jangan ada pemborosan anggaran. Karena dampak langsung dari pemborosan, banyak pengelolaan belanja daerah yang tidak efisien, efektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**

Belum juga dimulai penyampaian PA Fraksi, anggota DPRD, Pencon langsung melancarkan interupsi. Ia meminta agar kejadian pembahasan APBD selama tiga tahun belakangan (2016 sampai 2018) tidak kembali terulang pada tahun depan.

“Kejadian 2016-2018, APBD kita selalu bermasalah, selalu difasilitasi provinsi. Ini harus

Sejumlah catatan disampaikan oleh fraksi DPRD terkait dengan persetujuan RAPBD Melawi diantaranya dari Fraksi PAN yang meminta agar kedepannya penyampaian draf APBD Melawi bisa lebih tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Jangan ada pemborosan anggaran. Karena dampak langsung dari pemborosan, banyak pengelolaan belanja daerah yang tidak efisien, efektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata juru bicara Fraksi PAN, Kartika Sari Astuti.

Sementara itu, dari Fraksi Golkar yang disampaikan langsung ketua fraksinya, Taufik meminta agar pemerintah semestinya fokus pada belanja yang menjadi prioritas mendasak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik serta kebutuhan masyarakat.

“Terkait alokasi DAK, kami minta bupati memperhatikan rasa keadilan secara kewilayahan, karena dalam APBD 2019, alokasi dana DAK ke jalur Sungai Pinoh seperti Sayan, Tanah

jadi catatan kita semua. Saya berharap 2019 tidak terjadi lagi. Tahun ini (2018) apa yang sudah disepakati dan disetujui, banyak tidak berjalan. Jembatan tidak jalan, PL-PL tidak berjalan. Tahun 2019 jangan sampai ada defisit dan tidak lagi kita selalu difasilitasi oleh provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, dalam penyampaian Pendapat Akhir, enam fraksi yang ada di DPRD Melawi menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan APBD Melawi 2019 dimana Pendapatan APBD ditetapkan sebesar Rp 1,173 triliun dan belanja diputuskan sebesar Rp 1,171 triliun.

Enam Fraksi ini juga menyetujui tiga Raperda Melawi yakni Raperda Pajak Sarang Burung Walet, Raperda Retribusi Layanan Kesehatan pada RS Pratama serta Raperda pola tarif jasa pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah RSUD.





Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan R APBD Melawi 2019, serta Raperda-Raperda Melawi tahun 2018 oleh Bupati dan ketua DPRD.

SUARA PEMRED/EKO SUSAJO

**DISAHKAN** - Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan R APBD Melawi 2019, serta Raperda-Raperda Melawi tahun 2018 oleh Bupati dan ketua DPRD.





daerah, sehingga pemerintah kehilangan dana untuk membiayai pembangunan tiga jembatan baja.

“Sumber dana kita hilang untuk bangun jembatan, kondisi defisit kita ternyata membengkak. Bertambah besar, maka kita harus menunda kegiatan,” katanya. **(eko/lis)**

Panji mengatakan sebenarnya defisit tahun ini tidak menjadi sebesar saat ini di mana proyeksi Pemkab Melawi bisa mencapai Rp 142 miliar, bila pada tahun lalu, pinjaman daerah tidak ditolak DPRD.

Ia mengungkapkan awal dari masalah defisit karena adanya penolakan pinjaman

“Saya tidak mau dan tentu tidak ada pihak ketiga yang sudah bekerja lalu tidak dibayar. Intinya hak mereka untuk mendapatkan pembayaran dari pemerintah bila sudah bekerja. Ini jadi masalah yang terus melebar dan ini hal yang tidak kita harapkan bila daerah terbebani utang,” katanya.

tidak dilaksanakannya sejumlah proyek PL hanya agar Melawi tidak terus berkubang dalam defisit yang nyaris terjadi setiap tahunnya.

“Saya tidak melaksanakan pembangunan tiga jembatan karena tidak tersedia anggarannya. Bahkan tak cukup hanya jembatan, saya juga harus menunda paket kegiatan. Tidak ada maksud lain agar Melawi tidak mengalami defisit. Defisit APBD 2017 yakni DAU Rp 34 miliar dan DAK Rp 20 miliar sesuai dengan audit BPK sudah harus dibayarkan tahun ini,” katanya.

Panji menegaskan, sejumlah PL yang tidak direalisasikan pada 2018 tidak akan lagi dianggarkan pada tahun berikutnya. Kecuali ada beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan tahun ini hanya belum dibayar, ini baru akan menjadi masalah.

Pino dan Soka sama sekali tidak dianggarkan sepeserpun,” katanya.

Taufik juga berharap paripurna DPRD tentang persetujuan RAPBD Melawi menjadi akhir dari semua kisruh dan polemik, utamanya terkait dengan pembahasan APBD Melawi. Ia berharap APBD bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Legislatif dan eksekutif bisa saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing,” pesannya.

Bupati Melawi, Panji dalam Sidang Paripurna RAPBD 2019 mengatakan berbagai hal yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dikarenakan dirinya tak menginginkan adanya defisit pada APBD 2018.

Panji menegaskan langkah yang diambilnya dengan menunda pembangunan tiga jembatan rangka baja dan ti-

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan  
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat